KINERJA GURU SEBELUM DAN SESUDAH SERTIFIKASI GURU DI SMU NEGERI I POSO

Serlia R. Lamandasa *)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja guru sebelum dan sesudah sertifikasi di SMU Negeri 1 Poso. Data yang digunakan adalah data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data yang telah terdokumentasi pada obyek penelitian. Populasi seluruh guru di SMA Negeri 1 berjumlah 31 orang dan sampel berjumlah 21 orang guru yang telah tersertifikasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kinerja guru telah tersertifikasi sangat baik dimana skor penelitian bergerak dari 957 – 1092 dan hasil skor dari 26 pertanyaan yang diberikan kepada 21 orang sebagai sampel memiliki skor 1008 yang berada pada kriteria penilaian sangat baik. Dan kinerja guru belum tersertifikasi diperoleh skor penilaian bergerak dari 456 – 520. Hasil skor dari 26 pertanyaan untuk guru yang belum tersertifikasi berjumlah 10 orang berada pada kriteria penilaian sangat baik dan memiliki skor 500. Selanjutnya kinerja guru secara keseluruhan dari 4 (empat) indikator kinerja guru telah tersertifikasi dan guru belum tersertifikasi berada pada kategori sangat baik, artinya tidak ada perbedaan kinerja antara guru telah tersertifikasi dan guru yang belum tersertifikasi berdasarkan kompetensi guru PP no. 16 tahun 2007.

Kata kunci : Sertifikasi Guru

*) Dosen Fakultas Ekonomi UNSIMAR Poso

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan system pendidikan di Indonesia perlu dilakukan peningkatan kualitas para pendidikanya dalam hal ini guru dan dosen. Dimana tugas guru dan dosen sangat menentukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan bahwa guru dan dosen harus berkualitas dan salah satu standar yaitu jika guru dan dosen telah tersertifikasi. Guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi social, dan kompetensi tersebut dinyatakan melalui sertifikasi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikasi pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi.

SMU Negeri 1 Poso adalah salah satu sekolah di Kabupaten Poso yang sebagian gurunya telah tersertifikasi. Jumlah keseluruhan guru sebanyak 31 orang yang terdiri atas 21 orang telah lulus sertifikasi dan 10 orang yang belum tersertifikasi. Salah satu syarat untuk memperoleh sertifikasi profesionalisme guru adalah dituntutnya guru dapat memenuhi *Equivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)* sebanyak 24 jam tatap muka. Selain itu setiap guru perlu melengkapi kelengkapan berkas-berkasnya seperti pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama melaksanakan tugas profesi guru dalam interval waktu tertentu.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian guru

Guru adalah omponen yang paling strategis dalam proses pendidikan. Komponen strategis lainnya yaitu peserta didik dan kurikulum Tanpa guru siapa yang akan melaksanakan proses pendidikan, tanpa peserta didik siapa yang akan diajar dan tanpa kurikulum apa yang akan diajarkan oleh guru dan peserta didik. Dengan demikian ketiga komponen ini saling keterkaitan.

Ada dua aspek utama yang terkait dengan guru atau pendidik :

1. Kualifikasi akademik dan kompetensinya
2. Tingkat kesejahteraan para pendidik

2. Syarat-syarat menjadi Guru Profesional

Menurut Hamalik dalam Yamin (2006), guru professional harus memiliki persyaratan :

- 1) Memiliki bakat sebagai guru
- 2) Memiliki keahlian sebagai guru
- 3) Memiliki keahlian yang baik dan trintegrasi
- 4) Memiliki mental yang sehat
- 5) Berbadan sehat
- 6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
- 7) Berjiwa Pancasila
- 8) Merupakan warga Negara yang baik.

3. Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi

Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi, sebagai berikut :

- 1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kualifikasi akademik diperoleh melalui Perguruan tinggi (sarjana atau Diploma IV).
- 3) Kompetensi pedagogic, kepribadian, social dan kompetensi professional diperoleh melalui pendidikan profesi
- 4) Sertifikasi diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi dan sertifikat pendidik dilaksanakan secara obyektif.
- 5) Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

4. Empat Tahap Mewujudkan Guru Profesional

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Di Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis sekolah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan (4) profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani.

Berkaitan dengan penyediaan guru, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang dalam buku ini disebut sebagai penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua produk hukum ini, lembaga pendidikan tenaga kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang Guru, telah mengamanatkan bahwa ke depan, hanya yang berkualifikasi S1/D-IV bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru. Itu pun jika mereka telah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan profesi. Dua produk hukum ini menggariskan bahwa peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri, yang sangat mungkin didasari atas kuota kebutuhan formasi.

Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini. *Pertama*, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV. *Kedua*, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. *Ketiga*, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. *Keempat*, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. *Kelima*, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. *Keenam*, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. *Ketujuh*, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya. *Kedelapan*, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 7. Pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan.

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke depan hanya seseorang yang berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D-IV

dan memiliki sertifikat pendidik yang “legal” direkrut sebagai guru. Jika regulasi ini dipatuhi secara taat asas, harapannya tidak ada alasan calon guru yang direkrut untuk bertugas pada sekolah-sekolah di Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah mereka direkrut untuk menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus sekolah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi.

Ketika menjalani program induksi, diidealisasikan guru akan dibimbing dan dipandu oleh mentor terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar benar-benar siap menjalani tugas-tugas profesional. Ini pun tentu tidak mudah, karena di daerah pinggiran atau pada sekolah-sekolah yang nun jauh di sana, sangat mungkin akan menjadi tidak jelas guru seperti apa yang tersedia dan bersedia menjadi mentor sebagai tandem itu. Jadi, sungguhpun guru yang direkrut telah memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat pendidik, yang dalam produk hukum dilegitimasi sebagai telah memiliki kewenangan penuh, masih diperlukan program induksi untuk memosisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional.

Pada banyak literatur akademik, program induksi diyakini merupakan fase yang harus dilalui ketika seseorang dinyatakan diangkat dan ditempatkan sebagai guru. Program induksi merupakan masa transisi bagi guru pemula (*beginning teacher*) terhitung mulai dia pertama kali menginjakkan kaki di sekolah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri.

Kebijakan ini memperoleh legitimasi akademik, karena secara teoritis dan empiris lazim dilakukan di banyak negara. Sehebat apapun pengalaman teoritis calon guru di kampus, ketika menghadapi realitas dunia kerja, suasananya akan lain. Persoalan mengajar bukan hanya berkaitan dengan materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, melainkan semua subsistem yang ada di sekolah dan di masyarakat ikut mengintervensi perilaku nyata yang harus ditampilkan oleh guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Di sinilah esensi program induksi yang tidak dibahas secara detail di dalam buku ini.

Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan

pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain adalah penting. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode dan teknik pengumpulan data, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner dan dokumentasi.
2. Populasi dan sampel yaitu populasi adalah sejumlah guru yang ada di SMU Negeri 1 Poso berjumlah 31 orang dan sampelnya ada guru-guru yang telah tersertifikasi berjumlah 21 orang.
3. Teknik analisis datanya yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan skala Guttman (Sugiyono 2007), dengan skor tertinggi 2 (dua) dan terendah 1 (satu), diperoleh :

- a. Guru telah tersertifikasi skor tertinggi = $2 \times 26 \times 21 = 1.092$
Skor terendah = $1 \times 26 \times 21 = 546$
- b. Guru belum tersertifikasi skor tertinggi = $2 \times 26 \times 10 = 520$
Skor terendah = $1 \times 26 \times 10 = 260$

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa kinerja guru telah tersertifikasi dan belum tersertifikasi dilihat dari kompetensi profesi pendidik yang meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, profesionalisme dan kompetensi social, sebagai berikut :

1. Guru telah tersertifikasi, memperoleh jawaban pada kategori baik yaitu 1.008 (957-1.092), artinya kinerja guru yang tersertifikasi sangat baik.

2. Guru belum tersertifikasi berada pada kategori sangat baik yaitu skor 500 (456 – 520)., artinya guru yang telah tersertifikasi adalah sangat baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan yaitu :

- a) Kinerja guru di SMUN 1 Poso sudah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi guru.
- b) Kinerja guru tersertifikasi dan guru belum tersertifikasi tidak ada perbedaan sesuai kompetensi guru berdasarkan PP No, 16 tahun 2007.
- c) Kompetensi profesionalisme guru baik yang telah sertifikasi maupun yang belum, tidak memanfaatkan teknologi informasi dan menunjang profesionalismen sebagai guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. Undang-undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- _____, 2005. Undang-undang Guru dan Dosen no. 14 tentang Guru dan Dosen
- _____, 2005. Peraturan Pemerintah no. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- _____, 2007. Peraturan Pemerintah no. 16 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi.
- Sugiyono, 2006. Metode penelitian kualitatif kuantitatif